

Rilis Pers INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022 INDEF

“Pemulihan di Atas Pijakan Rapuh”

Jakarta, 24 November 2021

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,2 persen pada APBN 2022 tampaknya tidak akan mudah untuk dicapai. Sungguh pun sinyal pemulihan dari dampak pandemi menunjukkan tanda-tanda penguatan, namun akselerasi pertumbuhan ekonomi masih akan sulit dilakukan. Sejumlah ‘halang-rintang’ kinerja perekonomian baik dari sisi eksternal maupun internal sudah menanti di tahun depan. Di sisi eksternal, ketimpangan kecepatan vaksinasi antar negara; kenaikan harga energi; meningkatnya inflasi; hingga rencana kebijakan *tapering off* Amerika Serikat berpotensi menjadi beberapa faktor pengganggu laju pemulihan ekonomi. Sementara di sisi internal, pemulihan ekonomi Indonesia berpijak pada fondasi rapuh yang memerlukan penguatan guna memastikan laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dapat berkelanjutan. INDEF melihat setidaknya terdapat **lima kerapuhan pemulihan ekonomi Indonesia**, yaitu:

1. Deselerasi ekonomi jangka panjang.

Sungguh pun dalam jangka panjang ekonomi Indonesia digadang-gadang akan menjadi nomor empat terbesar di dunia, namun tanpa usaha ekstra justru akan membuat bangsa Indonesia terlena. Faktanya, tren pertumbuhan ekonomi selama Era Reformasi justru mengalami perlambatan di banding Era Orde Baru. Bahkan dalam satu dasawarsa terakhir tren pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen, setelah di dasawarsa sebelumnya sebelumnya berada di rata-rata 6 persen. Tanpa upaya transformasi struktural yang kuat dan konsisten akan sangat mungkin pertumbuhan ekonomi pasca pandemi berada di level 4 persen.

2. Cekaknya rasio penerimaan pajak.

Dari waktu ke waktu rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mengalami penurunan. Bahkan dalam tiga tahun terakhir nilainya berada di *single digit*, yaitu 8,18 persen (2021*), 8,33 persen (2020), 9,76 persen (2019), setelah sebelumnya pada 2018 sebesar 10,24 persen. Dalam upaya mendongkrak rasio penerimaan pajak terhadap PDB ke arah *double digit*, pemerintah sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sayangnya, UU HPP ini diimplementasikan saat dunia usaha masih tertatih-tatih menuju pemulihan, sehingga sangat mungkin tidak akan optimal dalam pelaksanaan.

3. Utang melonjak, defisit membengkak.

Seiring dengan pelanggaran batasan defisit fiskal untuk menangani pandemi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) utang pemerintah melonjak dari posisi sebelum Covid19 sebesar 30,18 persen terhadap PDB (2019) ke 41,38 persen terhadap PDB

(September 2021). Pesatnya peningkatan utang ini tentu saja berbanding lurus dengan membengkaknya defisit fiskal dari -2,2 persen terhadap PDB (2019) ke -5,82 persen terhadap PDB (2021*) seiring dilepasnya batasan defisit fiskal hingga 2022 dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2020. Ketergantungan stimulasi pemulihan ekonomi dari utang ini dalam jangka pendek akan berakibat pada risiko kembali lesunya perekonomian saat disiplin fiskal diterapkan di 2023. Sementara dalam jangka menengah-panjang akan berimplikasi pada tergerusnya penerimaan negara untuk membayar beban bunga dan utang pokok. Jika peningkatan utang ini tidak diiringi dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sepadan, maka dapat dipastikan kebijakan fiskal ke depan akan semakin tumpul dalam mendorong perekonomian akibat amunisi ruang fiskal yang semakin cekak.

4. Seretnya pembiayaan perbankan.

Pemulihan ekonomi memerlukan daya dukung sektor keuangan secara memadai. Di Indonesia, 85 persen aktivitas ekonomi masih sangat bergantung pada sektor perbankan sehingga peran sektor ini sangat penting dalam mendukung pemulihan. Sayangnya, dampak pandemi ke perekonomian yang cukup dalam membuat pembiayaan perbankan mengalami kontraksi. Bank semakin berhati-hati memberikan kredit di tengah situasi ekonomi yang masih sulit. Padahal, tanpa dukungan kredit perbankan yang mencukupi, ekonomi juga akan susah terakselerasi. Oleh karena itu, baik kebijakan sisi *supply* maupun sisi *demand* kredit harus dijalankan secara paralel dan sepadan. Di sisi *supply* kebijakan moneter dan perbankan perlu terus adaptif terhadap upaya mengakselerasi ekonomi, sementara di sisi *demand* kebijakan fiskal juga perlu lebih pro aktif memulihkan sektor-sektor yang paling terdampak akibat pandemi dan sektor yang dominan menaungi usaha masyarakat yaitu UMKM.

5. Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan memburuk.

Pandemi membuat berbagai indikator kesejahteraan menurun tajam, tingkat pengangguran meningkat; kemiskinan naik; serta ketimpangan juga melebar. Mengingat sasaran ujung dari kebijakan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama, maka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid19 harus mampu menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan secara signifikan.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022 INDEF

Faktor penanganan pandemi baik dengan peningkatan vaksinasi maupun peningkatan disiplin penggunaan protokol kesehatan masih akan menjadi faktor penentu di dalam pemulihan ekonomi 2022. Di sisi lain, faktor fundamental ekonomi juga akan turut berkontribusi besar dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, baik itu berupa stabilitas nilai tukar rupiah; terkendalinya inflasi; maupun efisiennya suku bunga. Sayangnya, perkembangan ekonomi global pada 2022 diperkirakan menggambarkan ketimpangan pemulihan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena proses vaksinasi yang beda dalam tingkat kecepatan dan jumlah antara negara maju dengan negara berkembang, maupun faktor amunisi fiskal-moneter yang berbeda. Akibat dari perbedaan ini kemudian menimbulkan tingkat pemulihan ekonomi yang tidak sama, antara

negara maju yang relatif sudah lebih siap untuk kembali mengantisipasi dampak-dampak gejala perekonomian pasca pandemi, dibandingkan dengan negara berkembang yang pada saat ini masih mengakselerasi vaksinasi. Meskipun terdapat indikasi adanya optimisme pemulihan ekonomi pada 2022 tetapi tetap diperlukan upaya kecermatan yang baik terhadap daya tahan perekonomian agar target-target tidak meleset dari yang sudah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor kerapuhan ekonomi yang terjadi saat pemulihan ekonomi dari pandemi, **INDEF memproyeksi perekonomian Indonesia 2022 sebagai berikut:**

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode pandemi sempat mengalami kontraksi yang dalam hingga tumbuh -2,07 persen yoy pada 2020. Pada 2021 ini secara berangsur-angsur kondisi perekonomian membaik, dimana pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III secara kumulatif sebesar 3,24 persen ctc. Adapun target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah dalam asumsi makro APBN 2021 ditetapkan sebesar 5 persen yoy, dan sebesar 5,2 persen yoy pada APBN 2022.

Meskipun laju perekonomian Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan, namun secara keseluruhan dinamika ekonomi domestik pada 2022 masih menyisakan berbagai batu sandungan dalam upaya mencapai target. Akibat kecepatan pemulihan ekonomi di 2020 dan 2021 yang tidak sesuai harapan dan masih berada di bawah tingkat pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah, sehingga upaya mitigasi dampak eksternal dari berlanjutnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju berpotensi sulit diantisipasi. Padahal kecepatan upaya meredam 'efek samping' kebijakan stabilisasi negara-negara maju akan menjadi salah satu penentu utama keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2022.

Salah satu tantangan utama mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2022 adalah terjadinya kenaikan harga energi global. Minyak bumi yang menjadi salah satu bahan baku energi utama dunia mengalami kenaikan harga seiring pemulihan ekonomi global yang dimotori oleh negara-negara maju. Sejalan dengan itu harga-harga energi substitusinya pun ikut mengalami kenaikan seperti harga gas alam dan batubara. Kenaikan harga energi akan memicu peningkatan biaya produksi, ujungnya harga-harga produk akan lebih mahal. Situasi tidak berhenti di titik ini, karena fenomena peningkatan harga terjadi pada saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Akibatnya, kenaikan harga energi global tidak hanya akan mengerek inflasi tetapi juga berpotensi memukul tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara telak.

Potensi kenaikan inflasi global yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan terganggunya rantai pasok bahan baku, bahan penolong, dan barang konsumsi selanjutnya juga berpotensi mendorong suku bunga global. Umumnya ini akan dipicu oleh kenaikan bunga acuan di negara-negara maju terlebih dahulu, sebelum tertransmisi ke bunga pasar. Implikasinya gap suku bunga antara negara maju dan negara berkembang menipis dan risiko terjadinya *capital outflows* meningkat. Situasi ini dapat menjadi lebih runyam lagi jika skenario pengurangan pembelian surat utang pemerintah AS oleh The Fed dilakukan secara agresif. Kebijakan yang dikenal dengan istilah *tapering off* ini sebenarnya sudah diantisipasi jauh-jauh

hari oleh bank sentral di negara-negara berkembang, namun mengingat besarnya perekonomian AS sehingga kekhawatiran akan adanya *shock* di pasar keuangan masih menjadi isu yang sulit untuk diredam. Pada titik ini upaya untuk dapat mengambil kebijakan preventif sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu pada saat negara-negara lain sudah mulai mengantisipasi gejolak ekonomi global 2022 akibat ketidakseimbangan pemulihan ekonomi negara maju dan negara berkembang. Jangan sampai Indonesia hanya menari di tengah genderang pemulihan ekonomi negara-negara maju. Oleh karena itu penting untuk melakukan sejumlah antisipasi agar ekonomi 2022 dapat mencapai target atau bahkan lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan pemerintah.

Di sisi ekonomi domestik, secara sektoral pemulihan ekonomi di masa pandemi distimulasi oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan primer terutama kebutuhan pangan dan kesehatan, serta sektor informasi dan telekomunikasi yang merupakan *backbone* ekonomi digital. Pada 2022 sektor-sektor tersebut masih akan menjadi motor penggerak utama seiring belum pastinya akhir pandemi. Bersamaan dengan itu mulai membaiknya kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan akan berlanjut pada 2022 dengan tantangan utama kenaikan biaya produksi akibat harga energi, dinamika kurs rupiah, serta belum pulihnya daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran masih akan ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dan investasi (PMTB/Pembentukan Modal Tetap Bruto). Kenaikan harga energi menjadi pisau bermata dua bagi perekonomian Indonesia, di satu sisi hal ini mengerek biaya produksi, namun di sisi lain juga memacu kenaikan harga komoditas tambang terutama batubara dan komoditas pertanian seperti CPO (minyak sawit mentah). Kontribusi ekspor mengalami peningkatan terutama dari kenaikan harga komoditas mineral tambang dan CPO.

INDEF melihat bahwa tantangan perekonomian pada 2022 masih cukup besar, sungguhpun di sisi lain Indonesia mulai mampu mengendalikan Pandemi Covid19. Akibat pemulihan ekonomi yang masih di bawah target membuat terbatasnya ruang gerak kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam memitigasi gejolak global tahun depan dan mengakselerasi ekonomi domestik. Implikasi dari risiko ketidakmampuan mengoptimalkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional ini selanjutnya akan terefleksikan dari **tingkat pertumbuhan ekonomi 2022 yang diproyeksikan sebesar 4,3 persen yoy**.

2. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah terhadap US dollar (USD) pada 2021 relatif stabil dan dapat dijaga sesuai target APBN (Rp14.600/USD). Namun demikian situasi ekonomi pada 2022 memiliki tantangan yang cukup berbeda dengan situasi 2021 yang hampir semua negara masih berkuat pada upaya mengendalikan pandemi. Pada 2022 ada negara yang sudah relatif keluar dari situasi pandemi dan ada yang masih berjuang mengendalikan pandemi. Dengan situasi ini respon kebijakan moneter antar negara bisa berbeda-beda, tergantung kebutuhan masing-masing. Ada negara yang sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan stabilisasi atas berbagai potensi tekanan ekonomi global seperti rencana *tapering off* maupun kenaikan inflasi. Di sisi lain banyak juga negara-negara yang masih berupaya untuk menjaga

ekspansi moneter guna memacu perekonomian. Perbedaan respon ini akan membedakan tingkat risiko dinamika nilai tukar pada 2022.

Pada asumsi makro APBN 2022 nilai tukar rupiah terhadap USD ditetapkan sebesar Rp14.350/USD. Pemerintah cukup optimis dapat menjaga nilai tukar di level tersebut seiring dengan tren peningkatan cadangan devisa Bank Indonesia yang berada di posisi USD145,46 miliar pada Oktober 2021. Di sisi lain tantangan nilai tukar rupiah pada 2022 juga diperkirakan meningkat. Beberapa perkiraan sumber tekanan kurs Rupiah pada 2022 antara lain; *pertama*, kebijakan *tapering off* yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ujung kebijakan ini kemungkinan akan berimplikasi kepada kenaikan suku bunga global dan risiko *capital flight* ke negara-negara maju di tahun depan. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus mampu mengantisipasi situasi ini sehingga nilai tukar tetap stabil di tengah pemulihan ekonomi yang tidak imbang antara negara maju dan negara berkembang.

Kedua, pemulihan ekonomi khususnya di sektor industri diperkirakan akan kembali meningkatkan permintaan impor. Hal ini dikarenakan masih tergantungnya berbagai bahan baku, bahan penolong, dan barang modal industri dari impor. Permintaan impor yang meningkat akan mendorong naiknya permintaan mata uang US dollar sehingga penyediaan likuiditas di pasar valas Indonesia perlu dijaga.

Ketiga, kenaikan harga energi juga akan meningkatkan permintaan valas khususnya US dollar. Untuk tingkat konsumsi energi yang sama, misalnya saja konsumsi BBM, maka diperlukan jumlah dollar yang lebih besar seiring kenaikan harga minyak. Hal ini dikarenakan sebagian kebutuhan BBM Indonesia dihasilkan dari impor minyak bumi. Di sisi lain, kenaikan harga energi juga mendorong kenaikan harga komoditas yang berpotensi menguatkan ekspor dan cadangan devisa. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga surplus neraca perdagangan agar potensi gangguan terhadap nilai tukar dapat diredam. INDEF memproyeksikan rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap US dollar pada 2022 akan berada di **Rp14.500/USD**.

3. Inflasi

Tingkat inflasi pada 2022 diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat dari capaian inflasi di 2021. Seiring pemulihan ekonomi tentu secara alamiah inflasi juga akan terdorong naik. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor fundamental yang membuat inflasi pada 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan 2021. Beberapa faktor fundamental yang akan memicu kenaikan inflasi tersebut adalah kenaikan harga energi yang akan berimplikasi kepada meningkatnya biaya produksi dan pada akhirnya terepresentasikan dari harga jual suatu produk/jasa tersebut.

Selanjutnya, potensi adanya kenaikan suku bunga kredit di tengah pemulihan ekonomi dapat saja terjadi seiring kenaikan inflasi dan respon kebijakan moneter dalam upaya menjaga stabilitas moneter dari tekanan nilai tukar dengan kenaikan bunga acuan. Tanda-tanda kenaikan inflasi pada 2022 tidak hanya terjadi di perekonomian domestik, namun juga di perekonomian negara-negara maju. Lebih cepatnya *recovery* di negara-negara maju membuat kenaikan inflasi sudah mereka rasakan, sementara negara-negara berkembang masih berjuang memulihkan daya beli dan menaklukkan pandemi. Suku bunga kredit yang

berpotensi naik pada gilirannya akan mendorong biaya produksi di pelaku usaha yang kemudian ditransmisikan ke harga jual produk.

Faktor pemicu inflasi berikutnya yang juga perlu diantisipasi yaitu risiko depresiasi nilai tukar di 2022 yang dapat mendorong kenaikan *imported inflation*. Akibat dari dinamisnya perkembangan pasar portofolio seiring tren kenaikan inflasi dan suku bunga yang merubah preferensi investor jangka pendek, nilai tukar Rupiah dapat mengalami tekanan sehingga berujung pada biaya impor yang lebih mahal untuk bahan baku, bahan penolong, maupun barang jadi buatan luar negeri. Padahal tingkat ketergantungan industri di Indonesia pada komponen impor masih cukup tinggi.

Faktor gangguan produksi di dalam negeri juga dapat menjadi tantangan yang memicu peningkatan inflasi. Kontributor utama inflasi di Indonesia adalah inflasi yang bersumber dari volatilitas harga bahan pangan. Akibat curah hujan yang tinggi dan bencana banjir yang umumnya terjadi hampir setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia dapat membuat inflasi meningkat. Sisi penyediaan berbagai macam komoditas pangan di berbagai daerah dapat terganggu, selanjutnya tentu saja harga akan meningkat.

Sayangnya, faktor-faktor pengerek inflasi di atas masih akan diikuti dengan tantangan pemulihan daya beli yang tidak ringan. Salah satu kebijakan penggerak daya beli tersebut adalah kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 11 persen yang diterapkan pada saat pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia masih berada di bawah target pemerintah. *Disposable income* masyarakat untuk konsumsi yang berkurang akibat kenaikan PPN ditambah dengan naiknya harga energi dan harga bahan baku yang 'memaksa' kenaikan harga jual produk secara keseluruhan akan mendelusi potensi akselerasi ekonomi. INDEF memproyeksi **tingkat inflasi pada 2022 sebesar 3,5 persen (yoy)**.

4. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun

Dalam asumsi makro APBN 2022 pemerintah menargetkan tingkat suku bunga SBN 10 tahun berada di level 6,8 persen. Seiring dengan potensi peningkatan risiko ketidakpastian ekonomi global di tahun 2022 akibat ragamnya variasi kecepatan pemulihan ekonomi antar negara, rencana *tapering off*, serta potensi kenaikan inflasi global diperkirakan tingkat suku bunga SBN secara umum akan naik. INDEF memproyeksikan **tingkat suku bunga SBN 10 tahun berada di level 7,0 persen**. Level tingkat suku bunga tersebut menggambarkan sebuah situasi di mana inflasi domestik cenderung meningkat pada 2022 dan adanya risiko *capital outflows* seiring dengan pemulihan ekonomi negara-negara maju yang lebih cepat, maka biasanya *yield* obligasi akan naik.

5. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran akan sedikit menurun seiring pemulihan ekonomi yang terjadi di 2022. Pemerintah menargetkan pengangguran akan turun ke level 5,5 – 6,3 persen pada APBN 2022. INDEF memperkirakan **tingkat pengangguran akan berada di level 6 persen pada 2022**. Faktor pendukung penurunan tingkat pengangguran ini adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan 2021. Di luar itu, juga terdapat peningkatan kinerja di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja salah satunya adalah sektor

industri, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan yang diperkirakan akan tumbuh lebih baik di 2022 setelah sebelumnya tiarap karena PPKM Darurat.

6. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diperkirakan juga akan mengalami penurunan seiring juga dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan juga masih cukup tingginya bantuan sosial yang diberikan pemerintah guna memberi bantalan konsumsi masyarakat bawah. Pada APBN 2022 tingkat kemiskinan ditargetkan dapat turun ke level 8,5 – 9,0 persen. INDEF memperkirakan kemiskinan akan sedikit menurun namun masih berada di atas range target pemerintah, yaitu **tingkat kemiskinan diproyeksikan berada di level 9,3 persen.**

7. Tingkat Ketimpangan

Tingkat ketimpangan pada 2022 diperkirakan masih akan tinggi dan berada di atas target pemerintah. Masalah perekonomian Indonesia saat ini adalah pemulihan di dalam negeri tidak rata di mana tingkat vaksinasi akan sangat mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi di masing-masing daerah, semakin cepat vaksinasi untuk mencapai target di masing-masing daerah maka akan semakin cepat pula perekonomian mengalami pemulihan. Di luar itu, juga ada faktor kenaikan harga komoditas yang memungkinkan pada daerah-daerah yang memiliki komoditas mineral tambang, energi, dan sawit akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi, sementara di daerah-daerah yang minim komoditas akan tetap menghadapi kendala pemulihan ekonomi. Hal ini tentu akan mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar pengeluaran (Rasio Gini). Pada APBN 2022 pemerintah mentargetkan ketimpangan di level 0,376 – 0,378. INDEF memproyeksikan pada 2022 **tingkat ketimpangan berada pada level 0,380.**

Tabel 1. Proyeksi Ekonomi Indonesia - INDEF

Indikator	INDEF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,3
Nilai Tukar Rp/US\$	14.500
Tingkat Inflasi (%)	3,5
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,30
Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)	0,380

Sumber : hasil analisis INDEF